

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

MENGURAI AKAR KEKERASAN MASSA DI
INDONESIA

KERJASAMA
FAKULTAS PSIKOLOGI - FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO
SABTU, 11 JUNI 2011



Penyunting :

Tri Na'imah
Dyah Astorini W

Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Prosiding Seminar Nasional
Mengurai Akar Kekerasan Massa di Indonesia
11 Juni 2011

Penyunting : Tri Na'imah & Dyah Astorini W. Purwokerto
Fakultas Psikologi - Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ISBN : 978-602-96623-3-7

- I. Seminar Nasional
Mengurai Akar Kekerasan Massa di Indonesia
- II. Tri Naimah & Dyah Astorini W

Diterbitkan oleh :
UMPurwokerto Press
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Purwokerto, 2011

Jl. Raya Dukuwaluh PO Box 202 Purwokerto 53182
Telp.(0281) 636751,630463 psw 231-232
Fax.(0281) 637239

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin dari
penyunting. Pengutipan harap menyebutkan sumbernya.

SUSUNAN PANITIA DAN TIM PENYUNTING

**SEMINAR NASIONAL
MENGUARAI AKAR KEKERASAN MASSA DI INDONESIA**

PENANGGUNGJAWAB

Drs. Pambudi Raharjo, M.Si (Dekan Fakultas Psikologi UMP)
Suyadi, SH., M.Hum (Dekan Fakultas Hukum UMP)

PANITIA PENYELENGGARA

Ketua : Dyah Astorini Wulandari, M.Si.; **Wakil Ketua** : Indriati Amarini, S.H., M.Hum; **Anggota** : Dra. Tri Naimah, M.Si.; Shanti Ratmawati, S.Psi. ; Suwarti, M.Si. ; Rr. Setyawati, M.Si; Rahtami Susanti, S.H., M.Hum; Dinar Sari Eka Dewi, M.Si.; Retno Dwiyantri, M.Si. ; Nur'aeni, M.Si ; Soediro, S.H., LL.M ; Ugung DAW, S.Psi., Susilo Wardani, S.H., M.Hum.

TIM PENYUNTING

Tri Na'imah
Dyah Astorini Wulandari

**FAKULTAS PSIKOLOGI - FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
Jl.Raya Dukuhwaluh PO Box 202 Purwokerto
Telp.(0281) 636751, 630463 psw 209/207
Fax. (0281) 637239**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SUSUNAN PANITIA DAN TIM PENYUNTING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
MAKALAH KEYNOTE SPEAKER	
Terorisme: Dimensi Kultur Dan Individu Indonesia (Perspektif Psikologi Forensik) Reza Indragiri Amriel	1
Penegakan Hukum (<i>Law Enforcement</i>) Terhadap Kasus-Kasus Kekerasan Massa Di Indonesia Noor Aziz Said	5
MAKALAH BIDANG HUKUM	
Politik Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan Terorisme Indriati Amarini	1
Kultus Kekerasan Atas Nama Agama Ichsan Syuhudi	13
Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Listyo Budi Santoso	18
<i>Law Enforcement</i> Dalam Aksi Kekerasan Massa Yang Berbasis Sentimen Keagamaan Susilo Wardani	26
MAKALAH BIDANG PSIKOLOGI	
Kekerasan Dalam Terorisme Susatyo Yuwono	34
Budaya Musyawarah Untuk Mufakat Yang Tergantikan Oleh Budaya Kekerasan Luh Putu Shanti Kusumaningsih	44
Studi Tentang Agresivitas Anak Dari Keluarga Miskin Di Purwokerto Tri Na'imah	49
Hubungan Antara Kebutuhan Akan Kekuasaan (<i>Need For Power</i>) Dengan Kecenderungan Agresi Pada Preman Di Desa S Kecamatan Sy Kabupaten Demak Dwi Margo Restyo Utomo & Falasifatul Falah	57

Hubungan Antara Harga Diri Dengan Kecenderungan Perilaku Agresif Pada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyumas..... M. Ali Nurdin & Suwarti	65
Hubungan Antara Konformitas Teman Sebaya Dengan Perilaku Agresif Pada Remaja Anggota Geng Motor Sarah Irawati & Agustin Handayani	74
Kekerasan Massa Chery Aditya Romiko	83
Perbedaan Agresivitas Antara Mahasiswa Yang Pernah Mengikuti Demonstrasi Dan Mahasiswa Yang Belum Pernah Mengikuti Demonstrasi Septina Rizki Amelia, Amrizal Rustam, dan Ratna Supradewi	88
Maraknya Perilaku Agresif Di Tinjau Dari Segi Psikologi Alexander Angga Harmawan	95
Adakah Perbedaan Gender Dalam Kekerasan? (Mengkaji Fenomena Perempuan Sebagai Pelaku Aksi Teror) Falasifatul Falah	100

KULTUS KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA

Oleh:

Ichsan Syuhudi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pekalongan

ABSTRAK

Bahwa pada dasarnya setiap agama mengajarkan kerelaan untuk berkorban demi kebaikan dan keselamatan banyak orang, ilmu pengetahuan meneguhkan hati, supaya tidak terombang-ambing. Kerelaan untuk berkorban demi kepentingan orang banyak adalah esensi ajaran setiap agama. Sekarang, para pemeluk agama malah rela mengorbankan kepentingan banyak orang demi kepentingan diri. Agama tidak mengajarkan kekerasan. Agama tidak membenarkan kekerasan. Tiada pula pemaksaan dalam hal beragama. Sesungguhnya, di balik berulangnya tindak kekerasan massa tersimpan persoalan besar. Yaitu, bangsa ini sudah kehilangan modal sosial. Nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, toleransi, urun rembuk, musyawarah-mufakat tak lagi menjadi obat mujarab bagi perekat bangsa.

Kata Kunci: agama, kekerasan, kebaikan, kerelaan, pengorbanan, toleransi,

PENDAHULUAN

Setiap masyarakat memiliki unsur kekerasan. Kekerasan bisa dalam bentuk fisik atau simbolik. Ia bisa diterima atau ditolak, muncul dalam konstruksi, reproduksi atau transformasi hubungan sosial. Sejak munculnya negara telah membangun dirinya di atas kekerasan dan Max Weber menilai bahwa penggunaan kekerasan yang legitimate adalah salah satu ciri negara. Ada pendapat yang mengatakan bahwa alasan fundamental dari kesimpulan di atas bisa dicari dari hati manusia.

Secara apologetis adalah terlalu mudah untuk mengklaim bahwa muatan agama pada dasarnya tidak violent (memiliki unsur kekerasan) dan bahwa manusia yang, baik secara individual maupun kolektif, membelokan dari makna sesungguhnya. Dalam kenyataannya akar kekerasan bisa ditemukan langsung dalam agama, karena itulah maka agama bisa dengan mudah menjadi kendaraan bagi tendensi kekerasan. Unsur pengorbanan merupakan hal penting dalam kebanyakan agama. Menurut teori Rene Girard memberi perhatian pada sifat fundamental kekerasan dan peran pengorbanan sebagai suatu cara melarikan diri dari kekerasan. Di sini pengorbanan menjadi sesuatu yang semakin ritual, yang menghasilkan kekerasan simbolik. Ini membuat kekerasan menjadi lebih abstrak dalam kaitannya dengan ritus Vedic, yang menunjukkan bahwa kekerasan tidak menghilangkan efek utama dari apa yang ditampilkan oleh penawaran ideal, di mana orang yang melakukan pengorbanan sekaligus menjadi korban. Sakralisasi kekerasan membuat kekerasan bisa dibedakan dengan kekerasan tak sah (*law less*), yang ditolak masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Konflik-konflik Kontemporer

Sebaiknya kita memberi penekanan pada kemungkinan sumber internal bagi kekerasan pada awal mula agama-agama agar kita dapat memahami fungsi sosial yang bisa diperankan agama dalam konflik-konflik jaman sekarang. Akan panjang jika menyebut semua konflik ini. Karena itu diperlukan referensi terhadap sanga beberapa dan sekaligus ciri dari konflik tersebut. Di Asia, kasus Srilangka terkenal karena kekejamannya, di sini terjadi pertentangan antara dua identitas sangat yakni antara Sinhalese dan kaum Budha dan antara suku Tamil dan kaum Najonalis. India berada dalam cengkraman suatu konflik, antara fundamentals Hindu dan kaum Muslim di satu sisi dan antara kasta tinggi dan kalangan dalit yang menganggap din mereka sebagai kaum tertindas di sisi lainnya.

Aksi kekerasan di Indonesia sepertinya terus mendapat tempat yang subur di negeri ini. Ruang-ruang publik kerap dipenuhi bentrokan dan amuk massa di banyak tempat, di banyak kesempatan, dengan beragam alasan. Aksi kekerasan itu bahkan semakin sadis. Semakin sadis, sekalipun penyebabnya hanya perkara sepele. Itulah yang terjadi di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (30/5) hingga Senin (31/5) dini hari. Pertikaian yang bermula dan senggolan antara mobil pribadi dan angkot berubah menjadi bentrokan antarwarga. Di situlah wajah sadisme dipamerkan. Satu orang tewas dibacok, ratusan rumah dan lapak serta sejumlah kendaraan dibakar dan dirusak. Apa yang terjadi di Duri Kosambi hanya contoh kecil dari sejumlah tindak kekerasan massa. Sebelumnya peristiwa serupa juga terjadi di Koja (Jakarta Utara), Mojokerto (Jawa Timur), dan banyak tempat lainnya.

Sesungguhnya, di balik berulangnya tindak kekerasan massa tersimpan persoalan besar. Yaitu, bangsa ini sudah kehilangan modal sosial. Nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, toleransi, urun rembuk, musyawarah-mufakat tak lagi menjadi obat mujarab bagi perekat bangsa. Tiada bangsa, tiada masyarakat, yang sepenuhnya bebas konflik. Akan tetapi, tiap bangsa, tiap masyarakat mestinya juga memiliki cara untuk mengatasinya. Malangnya, kearifan itulah yang lenyap dari tengah anak bangsa ini. Yang subur berkembang adalah rasa kebencian, amarah, dan nafsu saling membunuh sesama anak bangsa. Bukan memberi ruang bagi dialog dan musyawarah untuk mengatasi segala bentuk pertikaian dan konflik. Itu sebabnya, modal sosial bangsa ini sebenarnya dalam bahaya besar. Bahaya lantaran pertikaian atau konflik yang sepele begitu mudah meletup menjadi amuk massa. Terlebih bila itu terkait atau dikaitkan dengan unsur suku, agama, ras dan antargolongan. Padahal, modal sosial itulah yang melepaskan bangsa ini dan penjajahan dan melenyapkan era kediktatoran, serta semestinya dipergunakan untuk menghilangkan kemiskinan dan ketidakadilan di zaman reformasi ini.

Celakanya, di tengah terkikisnya modal sosial itu, tingkat kepercayaan publik terhadap aparat dan institusi hukum juga kian merosot. Aparat penegak hukum, yang bertugas melindungi dan mengayomi warga justru bertindak sebaliknya. Banyak fakta yang memperlihatkan ketika aparat lebih suka mengedepankan tindak kekerasan dengan berlindung di balik argumen penertiban. Begitu juga lembaga-lembaga penegak hukum kerap mempertontonkan keberpihakan kepada mereka yang berkuasa dan memiliki uang ketimbang kebenaran dan keadilan. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini untuk kembali memperkuat dan memperkaya modal sosial sekaligus menegakkan supremasi hukum.

B. Agama dan Kekerasan Sosial

Tiga mekanisme utama tampaknya turut mengambil bagian dalam hubungan antara agama dan kekerasan dalam fungsi-fungsi masyarakat yaitu catatan agama menyangkut hubungan sosial, agama sebagai suatu faktor identitas dan legitimasi atau delegitimasi etis hubungan sosial tertentu.

1. Catatan Agama tentang hubungan sosial

Secara kasar bisa dikatakan sebagai fungsi ideologis agama, ketika membentuk landasan masyarakat dengan memberikan catatan tentang hubungan sosial dan sekaligus memuat legitimasinya. Jadi ini adalah representasi agama dari tatanan sosial. Tatanan sosial adalah sesuatu yang diinginkan Tuhan dan hubungan yang ada antara kelompok-kelompok sosial yang membentuk masyarakat merupakan buah dari suatu keinginan supranatural. Biasanya keinginan ini berlaku untuk semacam naturalisasi tatanan sosial, alam dan hukumnya merupakan buah dari penciptaan agung. Tidak seorangpun bisa menjamahnya. Sehingga pada konferensi Medellin pada 1968 seorang uskup Brazil menyatakan bahwa ia mengekskomunikasi para petani didiosisnya yang berani menerima tanah selama reformasi agraria, karena hak milik atas tanah berasal dari Tuhan dan bahkan gereja pun tidak berhak untuk mengubahnya.

Posisi seperti ini berkembang ketika diperlukan pembenaran akan hubungan tidak seimbang yang tidak didasarkan pada perlakuan yang sama rata. Itulah sebabnya mengapa semua pemerintah feodal yang berlandaskan hubungan antara tuan (pemilik tanah) dan petani (tanpa tanah) menciptakan ideologinya pada

kekuasaan tertinggi. Sementara posisi tersebut kehilangan kredibilitasnya di Barat bersamaan dengan perkembangan kelas-kelas pedagang dan memburuk ketika munculnya kapitalisme industri, sebagian darinya tetap melakukan pembenaran atas kekuasaan di dalam masyarakat-masyarakat yang ditandai oleh Restorasi kediktatoran kaum sayap-kanan (Franco) dan mereka yang mengalami transisi antara nasionalis rjim dunia ketiga dan penetrasi kapitalisme internasional (Pinochet, Marcos, Suharto, Vedeleor, Banzer, Mobutu, Somozi).

Brahmanisme memiliki bentuk yang sama, yakni melakukan naturalisasi dan spiritualisasi hubungan kasta. Selain sekularisasi masyarakat India, fenomena ini masih tetap berpengaruh. Bisa jadi berkurangnya jenis catatan hubungan sosial ini menjadi suatu perkembangan yang semakin universal, bagi kesadaran kolektif, ketika struktur masyarakat semakin jelas diakui sebagai hasil karya manusia itu sendiri. Dalam kaitannya dengan penetrasi pasar sebagai gaya hidup dan sebagai bentuk pengorganisasian hubungan sosial, bentuk-bentuk ideologi lain sedang menggantikan catatan agama, hak milik dibenarkan berdasarkan hasil karya, hukum pasar.

Sekarang setiap naturalisasi hubungan sosial yang tidak seimbang merupakan sumber kekerasan, baik yang menciptakannya, mereproduksinya, atau dalam upaya perlawanan dalam menghadapi transformasi. Bahwa pada dasarnya setiap agama mengajarkan kerelaan untuk berkorban demi kebaikan dan keselamatan banyak orang; Ilmu pengetahuan meneguhkan hati, supaya tidak terombang-ambing. Harta benda hendaknya tidak sekadar membahagiakan tetapi memuliakan, sebagaimana seorang anak tidak hanya menyenangkan, tapi mengharumkan nama orangtua. Kerelaan untuk berkorban demi kepentingan orang banyak adalah esensi ajaran setiap agama. Sekarang, para pemeluk agama malah rela mengorbankan kepentingan banyak orang demi kepentingan diri. Agama tidak mengajarkan kekerasan. Agama tidak membenarkan kekerasan. Tiada pula pemaksaan dalam hal beragama. Lalu, kekerasan dalam diri kita ini berasal dari mana? Dari apa dan siapa? Jangan-jangan selama ini kita belum beragama sama sekali. Jangan-jangan selama ini kita hanya menipu diri, membohongi diri. Jangan-jangan keagamaan kita baru sekadar wacana, belum menjadi laku.

2. Agama sebagai Faktor Kultural Bagi Identitas

Identitas bisa didefinisikan sebagai rasa memiliki pada kelompok etnis, nasional atau sosial tertentu, yang pada gilirannya memberikan stabilitas so status, pandangan dunia, cara berpikir atau singkatnya budaya tertentu. Di jam sekarang agama dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan identifikasi kelompok. Identitas kelompok bisa dianggap sebagai hasil dari suatu kepemilikan etnis yang saling berbeda satu sama lain karena faktor agama yang dianut. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah konflik antara Israel dan Palestina. Agama hanya menjadi sebagian faktor relevan bagi kedua pihak, tetapi secara numerik dan sosial agama merupakan faktor penting. Bagi kedua pihak argumen agama merupakan hal penting. Setiap orang memiliki argumen masing-masing tetapi masing-masing mereka percaya bahwa mereka berjuang atas nama Tuhan. Bagi kalangan Yahudi ekstrim, bangsa terpilih mempertahankan tanah yang bisa mereka gunakan sebagai dukungannya. Penggunaan kekerasan merupakan suatu tugas agama bukan dirinya tetapi untuk mempertahankan nilai tertinggi. Bagi kaum Hamas Palestina upaya mempertahankan identitas muslim merupakan hal yang sakral. Pada kenyataannya ini dianggap syarat bagi keselamatan. Atas nama identitas muslim metode kekerasan digunakan sebagai pertahanan terhadap kelompok yang memiliki sumber daya cukup besar. Kedua belah pihak membunuh atas nama Tuhan dan keduanya melakukan hal tersebut agar suatu hari kelak kedamaian yang sesungguhnya akan tercapai, bergantung pada masa tersimpannya sisa-sisa kesetiaan pada tujuan agama.

Selain itu, kasus yang terjadi di Indonesia yang terkait dengan masalah ini adalah perbedaan pandangan antara FPI dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan/AKKBB yang telah keliru meletakkan konotasi tentang Ahmadiyah, sehingga mereka mengatakan bahwa Ahmadiyah ini adalah masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hasyim Muzad menuturkan, sebenarnya, masalah Ahmadiyah ini bukan masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan, tetapi ada masalah penodaan agama tertentu, dalam hal ini adalah Islam. Menurutnya, kalau Ahmadiyah lahir sebagai agama tersendiri itu tidak masalah. Tapi kalau dia (Ahmadiyah) mengaku Islam, lalu nabinya ada dua itu masalah dalam konteks ke-Islam-an, tidak dalam konteks agamanya (Ahmadiyah). "Saya kira, dalam agama lain pun demikian. Misal, jika ada orang Kristen dan saya orang Islam, tentu ia harus rela, karena hal itu adalah masalah kebebasan beragama. Tapi, jika ada orang Kristen

mengaku orang Kristen, tapi salibnya tidak ada Yesus-nya, tapi gambar orang lain, dia tersinggung enggak? Berarti itu adalah penodaan terhadap intern Kristen sendiri," beber Hasyim. Jadi, imbuah Hasyim, ini adalah masalah meletakkan Ahmadiyah dalam konteks kebebasan beragama, padahal ini konteksnya adalah pembelokan dari agama tertentu. Lain kalau dia (Ahmadiyah) sebagai agama sendiri, itu malah bebas, dalam konteks konstitusi Indonesia. Jadi, hendaknya dibedakan antara kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan masalah penodaan terhadap agama tertentu. Lalu, terjadi kekaburan atas dua hal tersebut. Hasyim juga menyatakan, pihak yang menyerang telah melakukan kesalahan di mana kekerasan dilakukan tanpa prosedur hukum yang berlaku. Apa pun alasannya, hal itu tidak dapat dibenarkan di dalam negara hukum seperti Indonesia ini.

3. Dukungan Agama bagi Etika Hubungan Sosial

Agama berfungsi sebagai suatu jaringan bagi catatan hubungan sosial dan juga bagi legitimasinya. Kasus-kasus ini terjadi di mana tidak terjadi sakralisasi hubungan tetapi di mana pemfungsian mendapatkan dukungan agama. Hal ini juga bisa mengangkat agama secara langsung ataupun tidak langsung dengan kekerasan. Pertama adalah dukungan moral yang diberikan pada ekonomi pasar yang menurut pemenang hadiah Nobel Milton Friedman, merupakan semata-mata nama lain untuk menyebut ekonomi kapitalis. Apa yang tampaknya diabaikan oleh posisi ini adalah eksistensi hubungan sosial yang tidak seimbang yang tidak membuat hubungan dalam pola ekonomi sosial menjadi hubungan yang bersifat resiprokal. Selain itu pola ekonomi pasar menciptakan dan mereproduksi ketidakseimbangan melalui logika pemfungsian. Ini adalah logika yang cenderung dijabarkan dalam skala dunia dan di semua sektor kehidupan manusia yang jelas tidak memiliki counter-balance (kekuatan penyeimbang). Kurangnya perhatian terhadap hubungan sosial membuat titik tolak ini digunakan secara ilusif. Para pendukung ekonomi pasar bisa terus mengatakan bahwa kebebasan pasar adalah ibu dari suatu kebebasan, sedangkan dewasa ini kita dapat melihat suatu peningkatan divisi sosial dan kemiskinan, ekonomi pasar mengakomodasi dengan baik rejim-rejim anti demokratis, kebijakan yang menindas gerakan sosial dan kekerasan struktural dalam hubungan sosial.

PENUTUP

Bahwa setiap pertimbangan menyangkut topik agama dan kekerasan harus mengikutsertakan suatu analisis tentang semua aspek situasi, baik fungsi agama dalam masyarakat maupun hubungan sosial yang muncul di dalamnya. Analisis terhadap pembenaran moral tidak bisa dianggap sepele.

Sesungguhnya, di balik berulangnya tindak kekerasan massa tersimpan persoalan besar. Yaitu, bangsa ini sudah kehilangan modal sosial. Nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, toleransi, urun rembuk, musyawarah-mufakat tak lagi menjadi obat mujarab bagi perekat bangsa. Tiada bangsa, tiada masyarakat, yang sepenuhnya bebas konflik. Akan tetapi, tiap bangsa, tiap masyarakat mestinya juga memiliki cara untuk mengatasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Thomas Santoso, *Kekerasan Politik Agama*, Surabaya, 2000

I Marsana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1994

Jack D Douglas and Frances Chaput Waksler, *The Sociology of Deviance An Introduction*, Boston, Little Brown And Company, 1982

Nurdien H. Kistanto, *Makalah Kekerasan Di Masa Transisi*, Januari 2010

Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel*, Princeton University Press, 1970